

# J24022117022

*by Fekon Uniga*

---

**Submission date:** 18-Mar-2023 03:22AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 2039923685

**File name:** JURNAL\_PEBY\_NURULDIANI\_24022117022.docx (35.32K)

**Word count:** 3789

**Character count:** 24160

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**(Studi Kasus di Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)**

**Peby Nuruldiani<sup>1</sup>; Lina Nurlaela<sup>2</sup>; Uu Suparman<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Garut

[24022117022@fekon.uniga.ac.id](mailto:24022117022@fekon.uniga.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Garut

[linanurlaela@uniga.ac.id](mailto:linanurlaela@uniga.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Garut

[uusuparman@uniga.ac.id](mailto:uusuparman@uniga.ac.id)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor - faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.. PBB di Desa Sirnasari mulai Tahun 2017-2021 setiap tahun belum memenuhi target yang ditetapkan. Fenomena yang muncul yaitu tidak bayarnya SPPT, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, fiskus yang lemah, wajib pajak lupa membayar pajak karena kesibukan pekerjaan, dan situasi daerah sasaran perpajakan.

Metode yang digunakan Metode deskriptif, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. peneliti dituntut untuk menganalisis bagaimana dan mengapa masalah berkembang dengan mewawancarai informan, melakukan prosedur pengumpulan data lainnya, atau memeriksa sumbernya agar wawancara lebih terarah dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, yaitu: (1) perlawanan aktif yaitu terdapat usaha pengabaian pembayaran PBB ketika ditagih beralasan sibuk bekerja. (2) Perlawanan Pasif yaitu situasi ekonomi wajib pajak yang lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari terpenuhi, Tingkat pendidikan yang kurang masyarakat tidak memahami bahwa PBB sangat besar kontribusinya, Kerangka kerja kurang pendanaan dari pihak bappeda. (3) Faktor lain selain yang terdapat dalam buku siti resmi : Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu karena menunggu ditagih, Lemahnya aparat pajak yaitu sehingga hanya 1 orang yang bekerja dalam bidang PBB, pemerintah dalam

pendistribusian SPPT terhambat waktu akibat jarak tempuh sehingga pendistribusian terlambat akibat jarak tempuh yang jauh.

**1**  
**Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Target Penerimaan PBB, Faktor Penyebab Tidak Tercapai.**

#### ABSTRACT

**1**  
This study aims to determine the factors causing the failure to achieve the target of land and building tax revenue in Sirna Sari Village, Samarang District, Garut Regency. Phenomena that arise are non-payment of SPPT, awareness and compliance of taxpayers, weak tax authorities, taxpayers forget to pay taxes due to busy work, and the situation of tax target areas.

**14**  
The method used is a descriptive method. The data collection technique used in this study is by using observation, interview and documentation techniques. researchers are required to analyze how and why problems develop by interviewing informants, carrying out other data collection procedures, or checking the source so that interviews are more focused and on target.

**1**  
Based on the results of the study, the factors causing the failure to achieve the target of land and building tax revenue in Sirna Sari Village, Samarang District, Garut Regency, namely: (1) active resistance, namely that there are attempts to ignore PBB payments when billed with the excuse that they are busy working. (2) Passive resistance, namely the economic situation of taxpayers who are more concerned with fulfilling their daily needs, the level of education that is lacking, the community does not understand that PBB has a very large contribution, the framework lacks assistance from Bappenda. (3) Other factors besides those contained in the official sitti book: Lack of awareness and compliance of taxpayers in paying taxes on time because they are waiting to be billed, Weak tax officials, namely that only 1 person works in the PBB sector, the government is hampered in the distribution of SPPT due to distance travel so that the distribution is delayed due to long distances.

**4**  
**Keywords: Land and Building Tax, Land and Building Tax Revenue Targets, Factors Causing Not Being Reached.**

## 1. Pendahuluan

Dalam kegiatan pembangunan pemerintah memerlukan penggunaan dana. Untuk menopang pertumbuhan, pungutan dalam bentuk pajak diharapkan dapat digunakan, dianggap sebagai tulang punggung pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu, agar setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, diperlukan peran masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) untuk mendanai negara. Penduduk wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam kedudukannya sebagai Wajib Pajak (PBB).

Kepala Bappeda Kabupaten Garut pada Kamis (12/11/2020) menyatakan bahwa 87,7 persen (Rp 9.298.886.764) dari seluruh anggaran telah tercapai hingga November 2020. Meski retribusi daerah belum mencapai target 20 miliar rupiah tahun ini, retribusi daerah masih bisa mencapai Rp 9 miliar per 30 November 2020 (45,10 persen).

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta masyarakat patuh membayar pajak. Dia juga meminta petugas pajak untuk aktif mengunjungi rumah wajib pajak. Ini bisa tercapai jika pemerintah proaktif. Untuk alasan budaya, orang masih menunggu untuk membayar jika ada tagihan. Faktor teknis seperti metode pengumpulan pajak dan tarif pajak adalah penting, tetapi kesediaan wajib pajak untuk mematuhi sama pentingnya.

Sekitar 200.000 orang menyebut Kabupaten Garut sebagai rumah. Dengan kata lain, Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 306.519 hektar (atau 3.065,19 kilometer persegi). Kabupaten ini terbagi menjadi 42 kelurahan dan 21 kelurahan dengan total 421 kelurahan.

Pajak yang dipungut di Desa Simasari masuk ke pendapatan Kabupaten Garut. Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Simasari ditujukan dan dicapai sebagai berikut pada periode 2017-2020:

**Tabel I.1**  
**Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017-2021 Desa Simasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, Target sasaran dan Realisasi yang sebenarnya.**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	46.060.763	36.822.610	80%
2018	54.384.112	38.068.878	70%
2019	54.384.112	40.788.084	75%
2020	54.440.720	38.084.266	70%
2021	54.406.095	38.084.266	70%

Sumber : Kantor Desa Simasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, 2021

Seperti yang dapat diamati dari informasi yang disajikan di atas, Target pajak bumi dan bangunan di Desa Simasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut dari mulai turunnya SPT bulan Maret sampai jatuh tempo pajak Dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Simasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Tahun 2017-2021 atau setiap tahun belum memenuhi target yang ditetapkan.

Fenomena yang muncul terutama antara lain tidak bayarnya SPPT, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, fiskus yang lemah, wajib pajak lupa membayar pajak karena sibuknya pekerjaan, dan situasi daerah sasaran perpajakan. Untuk itu, Usulan Penelitian berjudul "ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN" (Studi kasus di Desa Simasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut)

**7**  
**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Pajak**

Menurut Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi (2017:1) Pajak adalah kewajiban hukum untuk membayar persentase dari penghasilan seseorang ke kas negara sebagai akibat dari keadaan, peristiwa, dan tindakan yang menempatkan seseorang pada posisi tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, dan itu bisa dipaksakan, tetapi tidak ada layanan. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat diperlukan timbal balik dari negara.

**8**  
**2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan**

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pemerintah memungut pajak bumi dan bangunan yang disebut dengan “Pajak Bumi dan Bangunan” (PBB). Merupakan pajak yang bersifat material karena besarnya pajak yang terutang tergantung pada seberapa baik tanah/tanah dan/atau bangunan yang dipermasalahkan tetap dipertahankan.

**16**  
**2.1.3 Wajib Pajak**

“Wajib Pajak” adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, menurut Thomas Sumarsan (2017:9). Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan PBB dapat mengidentifikasi subjek pajak yang menjadi Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak mengetahui dimana letak objek pajak PBB.

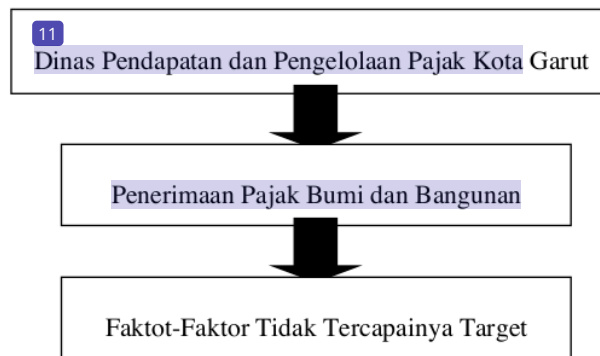
**2.2 Penelitian Terdahulu**

Persamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan. Misalnya oleh Rizki(2020) dan Deviani (2020) penelitian ini sama-sama menganalisis mengenai factor-faktor tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat kebaruan, tempat penelitian berbeda serta tahun penelitian yang berbeda.

**2.3 Kerangka Pemikiran**

UU Nomor 23 mengacu pada peraturan perundang-undangan tahun 2014. Semua urusan rumah tangga daerah, mulai dari pembangunan hingga pembiayaan, harus diberikan kepada daerah, sehingga mereka bisa mengawasi semua urusan pemerintahan atas nama mereka sendiri. Daerah sekarang dapat mengawasi dan mengelola keuangan daerahnya sendiri, yang sangat penting mengingat keuangan daerah memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah, seperti yang terjadi sebelumnya. Berikut ini dapat dikatakan tentang kerangka pemikiran berdasarkan kajian teoritis:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



## Optimalisasi Pencapaian Target

17

### 3.1 Metode Penelitian

#### 3.1.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

"Teknik penelitian" didefinisikan oleh Sugiyono (2017:2) sebagai "prosedur ilmiah yang objektif dan terarah untuk mengumpulkan data". Penulis menggunakan metode deskriptif dan kualitatif dalam penelitiannya, dengan fokus pada penelitian deskriptif, yang berusaha memberikan penjelasan rinci tentang fakta dan data untuk membantu pemecahan masalah.

20

### 3.2 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari subjek dengan bertanya dan menjawab urutan pertanyaan bolak-balik antara kedua belah pihak. Pedoman wawancara ini digunakan kepada Aparat petugas pajak PBB yang ada di Desa Sirnasari serta di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Peneliti akan melakukan wawancara dalam tahapan berikut untuk mengumpulkan data:

1. Untuk menjamin bahwa pertanyaan yang diajukan konsisten dan terkait dengan tujuan wawancara, kembangkan seperangkat pedoman wawancara.
2. Putuskan siapa yang akan diwawancarai dan siapa yang tidak.
3. Lokasi dan waktu wawancara harus ditentukan dan Wawancara harus disiapkan.
4. Wawancara harus dilakukan secara langsung.
5. Dokumentasi.
6. Tentukan apakah tujuan peneliti tercapai melalui hasil wawancara.
7. Dengan kata-kata Anda sendiri, rangkum, rangkum, dan revisi temuan wawancara.

12

### 3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

#### 3.3.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan ialah data primer data yang dikumpulkan melalui cara yang lebih tidak langsung dikenal sebagai data sekunder (tidak melalui perantara). Serta menggunakan data sekunder ialah data Dengan menggunakan perantara, (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). "Informasi sekunder juga dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti catatan atau makalah perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri yang disediakan oleh organisasi berita, atau juga melalui internet dan media lainnya."

26

#### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah diungkapkan oleh Sugiyono (2018:224), Berbagai pendekatan digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi prosedur ini. Informasi dikumpulkan melalui berbagai cara, termasuk observasi langsung serta wawancara dan bentuk catatan tertulis lainnya.

### 3.4 Pemilihan Informan

Seperti yang disebutkan dalam PMK No 48 tahun 2021 Tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan bahwa dengan beralihnya kewenangan pemungutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ke pemerintah daerah.

Karena pentingnya penelitian ini, sangat penting untuk memilih orang yang diwawancarai dengan teliti. Wajib Pajak, Penanggung jawab Pajak Bumi dan Bangunan, baik kolektor atau kepala dusun, adalah sumber informasi yang paling berharga. Maka penulis menggunakan Cluster Sampling untuk mengumpulkan data dari Bapak Asep Setiawan (Wajib Pajak), Bapak H.Dadan Herman (Kepala Desa Sirna Sari, serta Penanggung Jawab PBB), Bapak Udung Sukarna (Kepala Dusun & Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan), dan Bapak Ikhsan (Kasi Pemerintahan Kecamatan Samarang Kabupaten Garut).

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data guna mengkaji permasalahan penelitian ini yakni mengimplementasikan analisis data kualitatif mempergunakan model Miles dan Huberman. Kegiatan analisis data kualitatif menurut Miles serta Huberman (1984) yang dikutip sugiyono (2018:137) terdiri dari tiga kegiatan sebagai berikut: *Data Reduction, Data Display dan verification/Conclusion Drawing*

### 3.6 Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data, Moleong (2012) merekomendasikan penggunaan "perpanjangan partisipasi", "persistensi pengamatan", "triangulasi", "peer check", "kecukupan referensial", dan "studi kasus negatif". Untuk memverifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini, tiga metode alternatif digunakan: Sebagai hasil dari partisipasi yang lebih luas, Ketekunan pengamatan, dan Triangulasi.

## 4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Perlawanan Aktif

##### 1. Penggelapan pajak,

Narasumber 1 : Menurut bapak asep setiawan tidak akan ada penggelapan Pajak yang terdapat di sirnasari ataupun di daerah lainnya, karena semua data Wajib pajak sudah ada di pemerintah dan setiap melakukan penagihan pasti akan ketahuan apabila terjadi perubahan.

Narasumber 2 : Berdasarkan hasil penagihan dari kolektor pajak dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya indikasi tersebut dikarenakan dalam melakukan penagihan collector pajak melakukan pengecekan apakah SPPT yang akan diberikan itu benar dan sesuai apa tidak.

Narasumber 3 : Selama melakukan penagihan, para wajib pajak terbuka dan terang-terangan apabila terjadi perubahan ataupun perpindahan kepemilikan tanah/bumi serta kewajiban tersebut, sehingga tidak terjadi penggelapan pajak.

Narasumber 4 : Berdasarkan laporan dari tiap desa selama bapak ikhsan menjabat sebagai kasi pemerintahan dibidang pajak tidak ditemukan indikasi atau kejadian penggelapan pajak oleh wajib pajak.

##### 2. Penyelundupan pajak

narasumber 1 : Tidak terdapat penyeludupan pajak dalam bentuk apapun karna sudah terdapat petugas yang akan mendata apabila ada perubahan dalam SPPT.

Narasumber 2 : Selama bapak kepala desa simasari menjabat tidak ada atau tidak ditemukan penyelundupan dikarenakan selama ini cukup efektif dan tidak ada hal yang memungkinkan terjadi.

Narasumber 3 : Selama menjabat sebagai collector puluhan tahun, tidak pernah sama sekali ditemukan adanya indikasi penyeludupan.

Narasumber 4: Wajib pajak di desa sirnasari cukup kooperatif dan tidak ada data yang ditemukan melakukan penyelundupan pajak.

3. Pengabaian pajak adalah semua bentuk penghindaran pajak.

Narasumber 1 : Pengabaian pajak yang dilakukan masyarakat sebagian suka menunda-nunda untuk membayar pajak dengan alasan tidak punya uang, sibuk, ataupun menjanjikan akan membayarnya setelah pulang bekerja.

Narasumber 2 : Sebagian masyarakat masih ada yang berfikir mau bayar atau tidak, maka tidak apa-apa jadi wajib pajak berleha-leha.

Narasumber 3 : Dikarenakan kesibukan masyarakat yang tidak menentu maka seringkali masyarakat beralasan bahwa wajib pajak tidak ada dirumah sehingga penagihan pajak tertunda yang akhirnya dilakukan penagihan dilain hari dan berujung pajak menunggak yang mengharuskan desa menggalang tagihan tersebut agar PBB terlunasi.

Narasumber 4 : Banyak yang menunggak dan tagihannya yang akan ditagihkan di tahun berikutnya dengan alasan belum ada uang untuk membayar atau singkatnya merasa tidak mampu karena lebih mementingkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

#### 4.1.2 Perlawanan Pasif

1. Sebuah ekonomi;

Narasumber 1 : Perekonomian masyarakat di desa sirnasari sudah mulai membaik apalagi dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah, sehingga dapat dikatakan masyarakat mampu dalam membayar pajak.

Narasumber 2 : Desa tidak berhak menyimpulkan bahwa perekonomian tersebut baik/bagus atau tidak kecuali ada dari Badan Pusat Statistik (BPS), Namun jika disimpulkan dan dilihat dari kemampuan masyarakat dalam membangun rumah sampai 2 tingkat dapat dikatakan mampu dan memiliki ekonomi yang bagus.

Narasumber 3 : Kondisi perekonomian saat ini mulai membaik tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang membuat masyarakat merasa kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang ditambah dengan biaya untuk anak-anak sekolah, sehingga untuk membayar pajak bumi dan bangunan saja merasa tidak sanggup.

Narasumber 4 : Untuk tahun sebelum pandemi covid-19 dan sesudahnya baik dalam sosial maupun ekonomi karena terdapat banyak bantuan yang diterima warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan termasuk membayar pajak terutama yang memiliki tagihan pajak kecil/sedikit.

2. Iklim sosial masyarakat;

Narasumber 1 : Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika tidak membayar pajak maka tidak akan berdampak apapun terhadap kehidupannya.

Narasumber 2 : Karena yang namanya mayoritas di desa sirnasari mata pencahariannya buruh harian lepas maka ada yang sukses ada yang tidak.

Narasumber 3 : Kondisi sosial masyarakat saat ini bisa dibilang baik.

Narasumber 4 : Untuk tahun sebelum pandemi covid dan sesudahnya membaik.

3. Tingkat pendidikan dan pelatihan suatu populasi

Narasumber 1 : Tingkat pemahaman atau pengetahuan dalam pajak, masyarakat desa sirnasari kebanyakan hanya tau dari nama-nama pajaknya saja, namun tidak mengerti atau bahkan tidak mau tau untuk apa saja pajak-pajak tersebut jika di bayar.

Narasumber 2 : Sebagian masyarakat awam dalam pajak, makannya masyarakat berfikir tidak bayar pajak tidak apa-apa karena tidak dapat manfaatnya secara langsung.



Narasumber 3 : Kurangnya ilmu mengenai pajak dikalangan masyarakat membuat masyarakat merasa tidak perlu untuk membayar pajak,dan ketika mereka mendapat tagihan SPPT bertanya mengapa jumlahnya segitu,seandainya sudah tertera hitungannya dalam SPPT Dan jelas.

Narasumber 4 : Untuk mengenai ilmu pajak tergolong bagus dan baik walaupun tidak semuanya paham akan pajak.

#### 4. Kerangka kerja untuk mengumpulkan pajak secara keseluruhan

Narasumber 1 : Sistem pemungutan pajak di desa si<sup>27</sup>sari cukup memudahkan masyarakat untuk membayar karena kolektor menagih dengan cara dor to dor atau mendatangi rumah wajib pajak tersebut.

Narasumber 2 : Tata cara penagihan atau pemungutan cukup mudah untuk masyarakat,namun desa hanya memiliki 1 petugas pemungut karena hanya 1 orang yang sanggup dan sudah lama berkecimpung di PBB.

Narasumber 3 : Untuk pemungutan bagi masyarakat sangat mudah dalam membayar karena akan didatangi langsung ke rumah wajib pajak,namun untuk petugas merasa kesulitan karena hanya 1 orang yang melakukan pekerjaan sebagai kolektor pajak dari mulai turunnya SPPT, menyortir SPPT, mendata apabila ada perubahan, dan penagihan serta penyetoran dilakukan sendiri, sedangkan terdapat keterbatasan pada kolektor itu sendiri.

Narasumber 4 : Untuk sistem pemungutan di desa simasari sekarang sudah optimal walaupun Cuma 1 collector, ini dibuktikan setiap tahun lumayan baik capaiannya. Untuk reward ada dana yang dikembalikan lagi untuk mengimbangi bahwa penagihan pajak di lapangan itu susah (dapat digunakan untuk melunasi target pajak)

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Perlawanan Aktif

#### 1. <sup>23</sup>nggelapan pajak.

Berdasarkan hasil dari wawancara di <sup>1</sup>as,maka dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah bukan salah satu penyebab tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan.

#### 2. Penyelundupan pajak.

Berdasarkan hasil dari wawancara ke-4 narasumber atau informan <sup>11</sup> tidak ada perbedaan yang signifikan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada upaya penyelundupan yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak.

#### 3. Pengabaian pajak adalah semua bentuk penghindaran pajak.

Dapat disimpulkan dari hasil yang di dapat <sup>29</sup> ada wawancara 4 narasumber informan terdapat upaya pengabaian yang signifikan dalam membayar pajak karena wajib pajak merasa jika tidak membayar maka tidak akan berpengaruh apa-apa,serta wajib pajak beralasan sibuk dan merasa kebutuhan rumah tangga lainnya lebih penting dibandingkan membayar pajak.

### 4.2.2 Perlawanan pasif

#### 1. Sebuah ekonomi;

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapat dari ke 4 informan,terdapat <sup>5</sup>at persamaan persepsi yang dapat,sehingga penulis menyimpulkan bahwa Kecenderungan masyarakat pada umumnya adalah menekan seminimal mungkin pengeluaran (cost) termasuk didalamnya pengeluaran untuk membayar pajak, sehingga seringkali masyarakat baru akan membayar pajak ketika sudah ditagih atau ketika kewajiban perpajakan tersebut dikaitkan dengan layanan pemerintahan.

Ditambah lagi pend<sup>21</sup>atan yang menurun di awal masa covid-19 dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yang berkepanjangan menyebabkan seluruh harga kebutuhan pokok meningkat tajam sedangkan ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan wajib pajak atau masyarakat mengurangi kegiatan diluar rumah<sup>22</sup> sehingga pendapatan berkurang bahkan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih dan mementingkan kebutuhan masyarakat sehari-harinya terpenuhi daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak.

2. <sup>3</sup>lim sosial masyarakat;  
Sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Wajib pajak beranggapan membayar pajak atau tidak seperti tidak ada pengaruh, karena kurangnya bukti nyata manfaat dari pajak tersebut. Wajib pajak lebih memilih<sup>15</sup>ngnya digunakan untuk keperluan lain. Terjadinya kemalasan masyarakat dalam membayar pajak sehingga mereka menyimpulkan tidak adanya waktu membayar pajak dikarenakan sibuk bekerja dsb.
3. <sup>4</sup>ingkat pendidikan dan pelatihan suatu populasi  
Masyarakat belum memahami fungsi pajak. Hal ini bukan hanya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melainkan menjadi faktor yang telah mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi di Indonesia dan juga Hal ini menjadi fakt<sup>3</sup> penghambat tersendiri sehingga mereka enggan untuk memenuhi kewajibannya. Masyarakat tidak memahami bahwa PBB sangat besar kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini karena pendidikan yang dominan rendah, sehingga pola pikir masyarakatnya belum sampai ke hal tersebut.
4. Kerangka kerja untuk mengumpulkan pajak secara keseluruhan  
Sistem yang diterapkan kolektor desa atau aparat petugas pajak tidak ada upaya pendampingan dari pihak bappeda pada saat melakukan penagihan.

#### 4.2.3 Faktor penyebab lain

Dari hasil wawancara ke-4 narasumber penulis menemukan adanya faktor lain diluar dari sumber buku siti resmi yang mengatakan bahwa ada 2 faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pajak yaitu faktor perlawanan akt<sup>1</sup> dan perlawanan pasif.

Narasumber mengatakan faktor lain yang menjadi Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya di Desa Sirnasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut adalah:

Narasumber 1 : Kesadaran wajib pajak yang kurang.

Narasumber 2 : kurang sadar dan patuh, wajib pajak hanya menunggu ditagih untuk membayar jika tidak ditagih maka diam saja tidak ada upaya atau kesadaran untuk membayar, bahkan ada yang sekalipun ditagih wajib pajak bersembunyi agar tidak membayar.

Narasumber 3 : Kesadaran yang kurang, petugas pajak yang kurang disiplin, keterbatasan waktu, kondisi wajib pajak di luar kota sehingga sedikit sulit untuk pungut.

Narasumber 4 : Terhambatnya aparat pajak (kolektor) dalam pendistribusian SPPT, kurangnya kolektor yang bekerja di lapangan, kurang disiplinnya aparat pajak, kurangnya aparat pajak, kesadaran masyarakat.

Dari yang dik<sup>1</sup>atakan oleh ke-4 narasumber dalam hasil wawancara maka, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dari 3 tahun kebelakang semenjak adanya covid-19 dapat dikatakan menurun karena jika dilihat dan diamati bisa dikatakan,

wajib pajak hanya menunggu ditagih untuk membayar jika tidak ditagih maka diam saja tidak ada upaya atau kesadaran untuk membayar, bahkan ada yang sekalipun ditagih wajib pajak bersembunyi agar tidak membayar. namun memang ada kendala dalam penagihan karena jika di atas Rp 500.000,- yang berhak menagih langsung tanpa perantara hanya bapenda.

## 2. Lemahnya Aparat Pajak

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Lemahnya Aparat Pajak, yaitu :

- A. Kurangnya Kolektor Lapangan karena di desa simasari hanya 1 orang yang bertugas menjadi kolektor sehingga semua tugas dari mulai menagih, melaporkan, dan menyetorkan hanya 1 orang saja.
- B. Tidak adanya uang transport atau pengganti dalam menjalankan tugasnya untuk menagih masyarakat sehingga tidak ada orang yang berminat menjadi kolektor pajak bumi dan bangunan.
- C. Masyarakat yang tidak cukup ditagih hanya dengan 1 kali ditagih membuat Aparat atau petugas pajak menyerah dalam menagih.
- D. Kesehatan kolektor pajak yang membuat semua tugasnya terhambat karena tidak ada yang mau membantu menggantikan tugasnya.  
Sistem yang diterapkan membuat kolektor desa atau aparat petugas pajak karena tidak ada upaya pendampingan dari pihak bappeda pada saat melakukan penagihan.

## 3. Faktor Internal (Pemerintah)

- a) Hambatan-hambatan dalam penyampaian SPPT (Surat Penagihan Pajak Terutang) oleh pemerintah.
- b) Sulit untuk menemui Wajib Pajak secara langsung.
- c) Alamat Wajib Pajak untuk penanggung pajak tidak dikenal atau wajib pajak pindah. Kurangnya Penyampaian SPPT kepada wajib pajak tepat pada waktunya.
- d) SPPT tidak sampai sehingga hal ini membuat Wajib Pajak Tidak mengetahui kapan harus membayar pajak.

7

## 5. Simpulan dan Saran

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan wawancara ke-4 (empat) orang narasumber, data, Uji Keabsahan Data, dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Desa Sima Sari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, yaitu:

- 1) perlawanan aktif yaitu terdapat usaha pengabaian pembayaran PBB karena beranggapan tidak membayar tidak berdampak apa-apa sehingga ketika ditagih beralasan sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk membayar.
- 2) Perlawanan Pasif yaitu situasi ekonomi wajib pajak yang kurang baik sehingga lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari terpenuhi dibandingkan pembayaran PBB, Tingkat pendidikan yang kurang sehingga masyarakat tidak memahami bahwa PBB sangat besar kontribusinya, serta kerangka sistem penagihan yang kurang efektif karena tidak ada upaya pendampingan dari pihak bappeda ataupun pihak kecamatan.
- 3) Faktor lain seperti : Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu karena menunggu ditagih, Lemahnya aparat pajak yaitu kurangnya aparat/kolektor sehingga hanya 1 orang yang bekerja dalam

bidang PBB, pemerintah dalam pendistribusian SPPT terhambat waktu akibat jarak tempuh sehingga pendistribusian terlambat.

## 5.2 **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang bermanfaat dan berkualitas dengan pembatasan yang dilakukan sebelumnya. Saran - saran ini diharapkan dapat membantu supaya tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut bagi Kantor Desa Simasari :

1. Lakukan pengecekan pembayaran tagihan PBB sebelum melayani wajib pajak yang akan mengurus administrasi mengenai surat-surat atau identitas, jika belum maka ingatkan atau ingatkan untuk membayar PBB terlebih dahulu bila perlu serta denda wajib pajak yang menunggak kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan,
2. Ajak mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan KKN, Rt/Rw setempat, atau pemuda desa untuk membantu Aparat/Kolektor pajak dalam proses administrasi PBB jika diperlukan.
3. Mengadakan sosialisasi di aula desa secara bergilir atau bisa juga melalui spanduk dan media cetak guna mengingatkan dan membangun kesadaran kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
4. Adakah upaya pengawasan oleh pihak kecamatan atau pihak bappeda pada saat melakukan penagihan agar lebih efektif.
5. Fasilitasi kolektor atau petugas pajak dalam hal kendaraan seperti motor/mobil ketika melakukan tugas sehingga penagihan terhadap wajib pajak yang jauh dapat mudah didatangi.

J24022117022

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Bina Darma Student Paper	1%
9	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://peraturanpajak.com">peraturanpajak.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://dokumen.tech">dokumen.tech</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://ejournal.uin-suska.ac.id">ejournal.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
17	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://peraturanpedia.id">peraturanpedia.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %

22	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://repositori.iain-bone.ac.id">repositori.iain-bone.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	Vianny M.L. Wowor, Harijanto Sabijono, Heince R. N. Wokas. "PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN MOTOLING DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	<1 %
25	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://elib.unikom.ac.id">elib.unikom.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://gadib98plasa.blogspot.com">gadib98plasa.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://repository.unisma.ac.id">repository.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	Subair Subair, Muhammad Su'un, Ratna Sari, Darwis Lannai, Syamsuri Rahim. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Maros", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2020	<1 %

30

[arndellimage.wordpress.com](https://arndellimage.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

---

31

[qdoc.tips](https://qdoc.tips)

Internet Source

<1 %

---

---

Exclude quotes      Off

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      Off